

**ANALISIS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) DENGAN PENDEKATAN *GOOD GOVERNANCE*
PADA DESA BANDING ANYAR KECAMATAN KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

SKRIPSI



**Nama : Ana Marlina
Nim : 222016079**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) DENGAN PENDEKATAN *GOOD GOVERNANCE*
PADA DESA BANDING ANYAR KECAMATAN KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Nama : Ana Marlina
Nim : 222016079

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ana Marlina

Nim : 222016079

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul : Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020



Ana Marlina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Desa
Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan
Komereng Ilir (OKI)

Nama : Ana Marlina
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 2020

Pembimbing I



Sa'adah Siddik, S.E., AK., M.Si., C.A., DR
NIDN/NBM: 0002095507/972321

Pembimbing II



Darmayanti, S.E., M.M
NIDN/NBM: 0219057901

Mengetahui,

Dekan

n.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirainuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani,
beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau
dapatkan”.*

(Ana Marlina)

*Dengan Izin-Mu dan dengan
Rahmat-Mu yaa Allah Skripsi
ini ku persembahkan kepada:*

- ❖ Ayahku Aripin dan Ibuku Rosulah.*
- ❖ Saudara-saudaraku dan suamiku.*
- ❖ Pembimbing Akademik dan Skripsi*
- ❖ Dosen-dosen UMP*
- ❖ Almamater*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih maupun Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)”, telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Adapun isi dari penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian pada bab II kajian pustaka terdiri dari landasan teori yang berisi tentang (alokasi dana desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, *good governance*, PEMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007), penelitian sebelumnya, pada bab III metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, operasional variabel, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik analisis, untuk bab IV hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari hasil penelitian, pembahasan dan penarikan kesimpulan, pada bab V terdiri dari simpulan dan saran.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada orang tua penulis ayah Aripin dan ibu Rosulah yang selalu memberikan semangat, nasihat serta kasih sayang yang sedemikian tulus dan kepada suami, kakak dan ayuk yang selalu memberikan semangat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Sa'adah Siddik, S.E., Ak.,M.Si.,C.A, dan Dosen Pembimbing II Ibu Darmayanti, SE,M.M yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku ketua program studi dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta karyawan dan karyawan.

5. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepada Pemerintah Desa Banding Anyar yang telah membantu memberikan data dan membantu melancarkan proses penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada semua pihak yang telah membantu, serta do'a yang telah diberikan semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Atas perhatian dan masukan yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang,
Penulis

Ana Marlina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Alokasi Dana Desa	10
a. Pengertian Alokasi Dana Desa	10
b. Tujuan Alokasi Dana Desa	10
c. Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD	11
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	12
a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	12
b. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	12
c. Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	15
d. Indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	16

3. <i>Good Governance</i>	17
a. Pengertian <i>Good Governance</i>	17
b. Karakteristik <i>Good Governance</i>	18
c. Prinsip <i>Good Governance</i>	19
d. Penerapan <i>Good Governance</i>	21
4. PEMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 22.....	22
5. PEMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 22 bagian ke IV	23
B. Penelitian Sebelumnya.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Operasional Variabel	32
D. Data yang Diperlukan	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Sejarah	36
2. Struktur Organisasi	36
3. Visi-misi.....	50
4. Profil Kantor Pemerintah Desa	50
5. Kondisi Perekonomian.....	52
6. Dasar Hukum	53
7. Program Pembangunan Desa	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	59
1. Alokasi APBDes Belanja tidak langsung 30%.....	59
2. Alokasi APBDes Belanja langsung 70%	61
3. <i>Participation</i>	63
4. <i>rule of law</i>	65
5. <i>transparency</i>	66
6. <i>Responsiviness</i>	67
7. <i>Consensus Orientation</i>	69
8. <i>Equity</i>	70
9. <i>Efficiency and effectiveness</i>	71
10. <i>Accountability</i>	72
11. <i>Strategic vision</i>	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	75
A. Simpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	laporan Alokasi APBDes Desa Banding Anyar 7
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya.....28
Table III.1	Operasionalisasi Variabel..... 32
Tabel IV.1	Data Aparatur Pemerintah Desa Banding Anyar..... 47
Tabel IV.II	Susunan BPD 48
Tabel IV.III	Program Kegiatan Pembangunan Desa..... 56
Tabel IV.IV	Laporan Realisasi APBDes 57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1. Struktur Organisasi.....	48

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Kartu Bimbingan	80
Lampiran 2 Surat Keterangan Plagiarism	81
Lampiran 3 Balasan Riset	82
Lampiran 4 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-qur'an.....	83
Lampiran 5 Sertifikat Pelatihan Komputer Akuntansi.....	84
Lampiran 6 Sertifikat Pelatihan Aplikasi Komputer.....	85
Lampiran 7 Sertifikat TOEFL.....	86
Lampiran 8 Biodata Penulis	87

ABSTRAK

Ana Marlina/222016079/ Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Tujuan untuk mengetahui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bila diukur dengan pendekatan *good governance* pada Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung kabupaten ogan komering ilir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di kantor Kepala Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung kabupaten ogan komering ilir. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi APBDes belanja tidak langsung hanya 20% dan belanja langsung 77% (belum sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007), sementara alokasi APBDes dengan pendekatan *good governance* belum diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

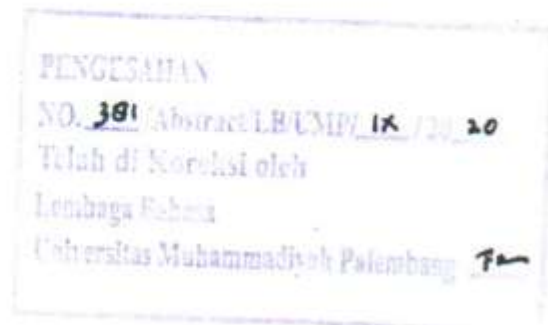
Kata Kunci : Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karakteristik *good governance*

ABSTRACT

Ana Marlina / 222016079 / The Analysis of Village Fund Allocation and Expenditure (APBDes) with Good Governance Approach in Banding Anyar Village, Kayuagung District, Ogan Komering Ilir Regency (OKI)

The purpose of this study was to determine the allocation of the Village Fund and Expenditure (APBDes) with a good governance approach in Banding Anyar Village, Kayuagung District, Ogan Komering Ilir Regency. This research used descriptive research. The research was conducted at the office of the Head of Banding Anyar Village, Kayuagung Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency. The data used were primary and secondary data. The data collections used were interviews and documentation. The analytical method used was qualitative analysis. This research used descriptive analysis techniques. The results showed that the Village Fund Allocation for indirect expenditure was only 20% and direct expenditure was 77% (not in accordance with regulation of ministry of trade Republic of Indonesia (PEMENDAGRI Number 37 of 2007), hence the allocation of APBDes with a good governance based approach had not been implemented.

Keywords: *Village fund and Expenditure Allocation, Good Governance*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Desa diharapkan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di Desa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumberdaya baik personil dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut juga mengatur keuangan desa dan aset desa dalam rangkaian memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu sumber pendapatan desa dan bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah

diatur dalam undang-undang desa adalah alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota.

Pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan penjabarannya dijabarkan dalam peraturan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah belanja tidak langsung 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan belanja langsung sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan suatu pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, demokratis dan amanah (*Good Governance*), pemerintah yang baik yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Penyusunan alokasi dana desa (ADD) merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Mardiasmo 2009: 18). Sementara itu, *work bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

V Wiratna (2015: 33) Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Pemerintah memberikan landasan bahwa semakin otonomnya desa secara praktek, bukan sekedar normatif. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 dan adanya alokasi dana desa yang juga diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2015, semestinya desa semakin terbuka (transparan) dan responsible dalam mengelola keuangan desa. Dalam kebijakan pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa ialah ke seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom diharapkan desa dapat mengolah keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengolah pendapatan maupun belanja anggaran.

Mardiasmo (2009:18) terdapat Sembilan karakteristik *good dovernance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas, aturan hukum, sikap responsive, berorientasi pada consensus,

kesetaraan/kesederajatan dan visi strategis. Dalam karakteristik *good governance*, paling tidak terdapat empat hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas,efektivitas, dan efisien serta partisipasi. Untuk mewujudkan *good governance and corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wida (2017) dan Yuni (2018) menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah dapat terkelola dengan baik, sesuai dengan pendapat Adisasmita (2014 : 34) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Ada pula dari posisi negatif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya penyusunan APBDes, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang yang berubah-ubah, dan ada pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan APBDes, hal ini dilakukan dengan cara melakukan koordinasi kepada dinas terkait agar perangkat mengetahui kapan dan berapa dana yang akan turun ke desa, untuk memperlancar proses penyusunan keuangan desa,tidak merubah kesepakatan dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Randi (2019) dan Fitriati (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes sudah terealisasi sesuai dengan peraturan bupati, akan tetapi dalam pengawasan keuangan desa tidak terlihat pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan kurang pemahannya

masyarakat tentang program alokasi dana desa yang dijalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian Rizal dkk (2017) dalam pengelolaan APBDes di Desa Bituniris belum sepenuhnya berjalan dengan baik dimana pengelolaan APBDes/keuangan desa masih belum sesuai dengan anggaran yang ada.

Berdasarkan penelitian Taufik (2017) menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) belum sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah .

Berdasarkan penelitian Teti dan Rigel (2018) menunjukkan bahwa sistem penelitian alokasi dana desa telah menerapkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa secara teknis maupun administrasi cukup baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi terkendala dalam menerapkan sistem keuangan. Berdasarkan penelitian ridwan dan yusuf (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Beberapa fenomena yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam upaya menuju tata laksana pemerintahan desa yang baik (*good governance*), pemerintah desa menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan tata pemerintah desanya, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Salah satu bukti dan cara yang diterapkan adalah dengan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tiap

tahunnya melalui titik yang mudah dibaca oleh masyarakat. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui secara aktif mengawal dan turut serta mensukseskan program kerja pemerintah desa yang tertuang dalam APBDes. Melalui peraturan desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang APBDes dan peraturan desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020, pemerintah desa telah menuangkan rencana kerja untuk satu tahun kedepan.

Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan desa yang menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa dalam Pasal 22 dimana anggaran alokasi dana desa untuk belanja tidak langsung sebesar 30% dan untuk belanja langsung sebesar 70%. Fenomena yang terjadi di Desa Banding Anyar penggunaan alokasi dana desa di Desa Banding Anyar untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan dari 30% dan belanja langsung mengalami kenaikan dari 70% sehingga alokasi dana desa belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Berikut Data Alokasi Dana Desa Banding Anyar Anggaran Tahun 2018.

Tabel 1.1
Laporan Anggaran Alokasi Dana Desa Banding
Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI

Uraian	Penerimaan APBDes (Rp)	Pengeluaran APBDes (Rp)	
1. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018	277.408.000		
2. Dialokasikan		83.222.400	
a. belanja tidak langsung 30%			
b. Belanja Langsung (70%)			194.185.600
3. Realisasi Anggaran Dana Desa		57.000.000	
a. Belanja tidak Langsung 20%			
b. Belanja Langsung 77%			214.408.000

Sumber: kantor kades Desa Banding Anyar 2018

Pada Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa belanja tidak langsung sebesar 20% diperoleh dari data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa sedangkan belanja langsung sebesar 77% diperoleh dari data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Hali ini Menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Karena belanja tidak langsung pada realisasi anggaran dan pendapatan belanja desa sebesar 20% sedangkan belanja langsung pada realisasi anggaran pendapatan belanja desa sebesar 77%. Sedangkan didalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman

pengelolaan keuangan Desa dalam pasal 22, bahwa penggunaan anggaran realisasi Dana Desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% untuk belanja aparatur operasional pemerintahan Desa , sedangkan untuk belanja langsung sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat , tetapi pada kenyataannya pada laporan Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI tidak sesuai dengan persinya.

Menurut kepala Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak terealisasi akan ditransfer kembali pada kementerian keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Berdasarkan uraian latar belakang dan dasar teori yang ada, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul”**Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendekatan *Good Governance* pada Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah analisis alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dengan pendekatan *good governance* pada Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten ogan komering ilir (OKI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dengan pendekatan *good governance* pada Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai analisis alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dengan Pendekatan *good governance* pada Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering ilir (OKI)?

2. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam menjalankan analisis alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dengan pendekatan *good governance* pada Desa Banding Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)?

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian selanjutnya pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Desi Novita Aulya dan Wildan Syafitri.2017. Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Untuk Masyarakat Margin Di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. (online)*Vol.5 No.2 (<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3929>) di akses 5 juni 2020. 15.40
- Mardiasmo.2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV.Andi.
- Hasman Husin Sulumin, 2019. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. (online)*,Vol.3,No.1(2015)(<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4246>)diakses 9 Juni 2020. 12:00.
- Randi Setiawan. 2019. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan. *Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi. (online)* Vol 2 No.2 <http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/5831> diakses 10 juni 2020, 11.03 AM
- Rizal,dkk. (2017). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dalam menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. (online)*, Vol 3 No 1 diakses 10 Juni 2020, 10.00 PM.
- Sujarweni.V Wiratna 2019. Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni .Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sedarmayanti . 2012. Good Governance Pemerintahan Yang Baik Dan *Good Corporate Governance* Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Bandung : Cv. Mandar Maju.
- Taufik Katialo. 2017. Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang. *jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, (online)*Vol 3, No 1 (2018) , diakses pada 12 juni 2020. 09:06
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Peraturan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wida Puspa Sari. 2017. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakan manggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. (online) , Vol.4,No.1(2017) diakses 12 juni 2020, 09.07 PM